

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung bersinergi dengan dinas terkait termasuk didalamnya Kecamatan Regol. Berikut hasil temuan dalam penelitian ini :

1. Dalam pelaksanaan koordinasi Pembinaan PKL di kawasan Tegallega komunikasi belum berjalan optimal dan intensif, proses integrasi masih belum optimal karena terkadang pelaksanaan tugas juga di dasarkan pada kondisi di lapangan dan tingkat urgensinya, belum adanya sistem informasi yang dapat mempermudah proses pertukaran informasi, adanya permasalahan pendataan yang tidak dilakukan secara berkala, sehingga data mengenai PKL menjadi simpang siur yang kemudian menyebabkan instansi yang terlibat, kesulitan untuk menyelaraskan tugas-tugas dan menentukan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya dan program dalam rangka pembinaan PKL sudah disusun pelaksanaannya belum berkelanjutan.

2. Adapun faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya adalah adanya Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, kemudian dibentuknya Forum PKL terdata, serta adanya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan Kecamatan kewilayahan serta dinas-dinas terkait lainnya.

3. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam koordinasi pembinaan PKL ini adalah adanya keterbatasan anggaran dan SDM, masih minimnya tingkat pemahaman, pengetahuan serta kesadaran PKL terhadap aturan yang berlaku, pengawasan tidak dilakukan secara berkala, dan adanya hambatan komunikasi karena banyaknya instansi yang terlibat sehingga evaluasi sulit dilakukan secara rutin
4. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung yaitu adanya pendekatan humanis dengan para pedagang, berintegrasi dengan dinas lain terkait tahapan pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, bersinergi dengan aparat kewilayahan untuk melakukan pendataan kemudian diterbitkannya kartu Tanda Pengenal PKL, membangun sebuah sistem informasi yang bernama Aplikasi SIPKL (Sistem Informasi Pedagang Kaki Lima Kota Bandung), mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) seperti bimtek kewirausahaan, fasilitasi pembiayaan dan bimtek pengembangan usaha serta mengadakan evaluasi mengenai pelaksanaan penataan dan pembinaan bersama-sama dengan SATGASUS PKL Kota Bandung

5.2 Saran

5.2.1 Akademis

Dalam proses koordinasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tegallega Kota Bandung masih ada variable lain yang perlu di teliti yaitu terkait efektifitas implementasi aturan, karena pelaksanaan pembinaan mengacu pada aturan yang ada sehingga keefektifannya masih perlu di teliti lebih lanjut agar mendapatkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian management pemerintahan.

5.2.2 Praktis

1. Perlu adanya strategi-strategi khusus yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandung atas permasalahan yang muncul dalam proses koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Pelaksanaan dan tanggung jawab koordinasi perlu dilakukan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL sehingga tercipta suatu keselarasan tujuan.
3. Komunikasi dan evaluasi sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan guna tercapainya tujuan bersama dalam rangka optimalisasi penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

